

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian (Wikipedia Bahasa Indonesia). Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, maupun secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraanya, sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat,hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya kesenjangan baik kualitas maupun tingkat pendidikan. Begitu juga untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan, mereka semua berhak menerima pendidikan yang layak. Namun kenyataannya masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dapat terlihat dari

jumlah tenaga pengajar yang terdapat di sekolah perkotaan dan sekolah di pedesaan. Jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan dengan dipedesaan. Rendahnya minat guru mengajar di pedesaan diakibatkan oleh minimnya akses transportasi serta fasilitas sekolah yang kurang baik yang terdapat di pedesaan. Selain itu kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat terlihat dari sekolah- sekolah di perkotaan yang mempunyai fasilitas yang bagus dan memiliki pengajar yang berkompeten sehingga nantinya menghasilkan siswa- siswa yang cerdas. Hal ini berbanding terbalik terhadap sekolah- sekolah yang terdapat di pedesaan yang mempunyai fasilitas sekolah yang kurang baik dan tenaga pengajar yang kurang kompeten. Pemerintah dengan segala upayanya khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini sedang berupaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi dengan beberapa kebijakan diantaranya mewajibkan pendidikan 12 tahun yaitu setingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), perbaikan infrastruktur sekolah sebagai sarana belajar, peningkatan mutu dan kualitas sekolah, dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan, misalnya pembebasan biaya sekolah, beasiswa, maupun kebijakan sistem zonasi.

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan selanjutnya disempurnakan dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 yang ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Effendy (2017) menyatakan bahwa sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah bertujuan untuk pemerataan hak dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Sistem penerimaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini tidak berdasarkan capaian prestasi akademik, melainkan berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah (zonasi). Siswa berada di zona sekolah tersebut harus diterima, tidak boleh ditolak. Effendy (2017) menyatakan apabila ada sekolah favorit di suatu zona tersebut, maka itu menjadi hak dari siswa yang

berdomisili di zona sekolah tersebut. Kedepan menghindari adanya kastanisasi sekolah, sehingga tidak ada sekolah favorit dan tidak favorit. Kastanisasi ini menyebabkan anak-anak pandai dan kaya berkumpul di sekolah favorit, anak-anak kurang mampu dan biasa-biasa saja berkumpul di sekolah pinggiran. Pada dasarnya istilah sekolah favorit ini muncul karena siswanya yang pandai-pandai.

Permendikbud Nomor 1 tahun 2012 ayat 12 mengatur tentang beberapa jalur pendaftaran peserta didik baru yang dimana sistem zonasi juga termasuk di dalamnya. Beberapa sistem penerimaan siswa baru tersebut adalah penerimaan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ayat 13 menyatakan bahwa sistem zonasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk sekolah menengah atas negeri dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima, jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5% (lima persen) dan apabila terdapat sisa kuota pendaftaran maka dapat membuka jalur prestasi.

Ketentuan pendaftaran jalur zonasi telah di atur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ayat 16 ayat 1 sampai dengan 4, dimana diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali. Domisili yang dimaksud adalah berdasarkan alamat sesuai dengan Kartu Keluarga yang ditetapkan minimal 1 (satu) tahun sebelum penerimaan peserta didik baru.

Kabupaten Boyolali memiliki 15 Sekolah Menengah Atas Negeri yang tersebar di 22 kecamatan hasil dari pemekaran wilayah yang sebelumnya hanya memiliki 19 kecamatan atau terdapat 3 kecamatan tambahan yaitu Kecamatan Tamansari hasil pembagian dari Kecamatan Musuk, Kecamatan Gladagsari hasil pembagian dari Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Wonosamodro hasil pembagian dari Kecamatan Wonosegoro. Jumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Boyolali yang tidak mencukupi di setiap kecamatan serta sebaran lokasinya yang tidak merata menyebabkan berbagai kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut. Berbeda dengan sekolah menengah pertama

negeri di Kabupaten Boyolali yang disetiap kecamatan memiliki minimal atau lebih dari satu fasilitas pendidikan, kecuali pada wilayah yang merupakan hasil dari pemekaran, sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan tidak termasuk dalam kebijakan sistem zonasi, hal ini dikarenakan SMK merupakan sekolah kejuruan atau keahlian yang disetiap sekolah memiliki jurusan masing-masing dan kadang berbeda dari sekolah satu ke sekolah yang lain, berbeda dengan SMA yang disetiap sekolah memiliki jurusan atau program yang sama. Sistem zonasi juga tidak berlaku pada sekolah swasta, hal ini dikarenakan sekolah swasta tidak menjadi naungan dan wewenang dari Kemendikbud. Berikut merupakan tabel jumlah sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Boyolali menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tahun 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Boyolali.

No	Nama Kecamatan	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas
1	Boyolali	6	3
2	Ngemplak	2	1
3	Simo	3	1
4	Nogosari	2	1
5	Cepogo	3	1
6	Andong	2	1
7	Banyudono	2	1
8	Sambi	2	0
9	Mojosongo	4	0
10	Teras	3	1
11	Karanggede	2	1
12	Ampel	2	1
13	Klego	2	1
14	Juwangi	3	0
15	Sawit	3	0
16	Gladagsari	2	0
17	Selo	2	0
18	Wonosegoro	2	1
19	Musuk	2	0
20	Tamansari	1	0
21	Kemusu	2	1
22	Wonosamodro	0	0
	Jumlah	52	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 15 Sekolah Menengah Atas Negeri yang mengikuti ujian nasional dengan nilai rata-rata seperti pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Peringkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali berdasarkan rata-rata nilai ujian 2019.

NO	Nama Sekolah	Nilai Rata-rata UN	Jumlah Peserta
1	SMA Negeri 1 Boyolali	81,20	260
2	SMA Negeri 1 Simo	69,98	145
3	SMA Negeri 3 Boyolali	68,17	211
4	SMA Negeri 1 Teras	62,38	144
5	SMA Negeri 1 Andong	61,03	109
6	SMA Negeri 1 Karanggede	58,96	142
7	SMA Negeri 1 Ngemplak	58,00	190
8	SMA Negeri 2 Boyolali	57,77	191
9	SMA Negeri 1 Banyudono	53,81	103
10	SMA Negeri 1 Cepogo	53,40	83
11	SMA Negeri 1 Nogosari	51,97	56
12	SMA Negeri 1 Klego	51,85	106
13	SMA Negeri 1 Ampel	49,40	62
14	SMA Negeri 1 Kemusu	49,35	57
15	SMA Negeri 1 Wonosegoro	49,27	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali 2019

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa capaian nilai rata-rata tertinggi yang di peroleh dari Ujian Nasional tahun 2019 adalah SMA Negeri 1 Boyolali dengan rata-rata nilai 81,20 dari jumlah peserta ujian sebanyak 260 siswa, peringkat kedua adalah SMA Negeri 1 Simo dengan rata-rata nilai 69,98 dari jumlah peserta ujian sebanyak 145 siswa, dan peringkat ketiga adalah SMA Negeri 3 Boyolali dengan rata-rata nilai 68,17 dari jumlah peserta ujian sebanyak 211 siswa, sedangkan pada peringkat akhir adalah SMA Negeri 1 Wonosegoro dengan nilai rata-rata 49,27 dari jumlah peserta ujian sebanyak 56 siswa.

Oleh karena itu dari latar belakang di atas di dapatkan judul penelitian yaitu **“ANALISIS KESESUAIAN PERSEBARAN DAERAH ASAL SISWA DENGAN ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN BOYOLALI (Studi Kasus SMA Negeri 1 Boyolali, SMA Negeri 1 Simo, SMA Negeri 3 Boyolali).”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola distribusi keruangan asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana kesesuaian zonasi dengan daerah asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas maka dapat menentukan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui distribusi keruangan asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali.
2. Mengevaluasi kesesuaian zonasi dengan daerah asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan hasil penelitian atau bahan masukan untuk Kabupaten Boyolali dalam mengambil kebijakan khususnya pada bidang pendidikan.
2. Menambah referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian pada bidang pendidikan.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1. Sistem Pendidikan Nasional

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan

adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Beberapa ahli mempunyai beberapa teori tentang sistem pendidikan yang pertama yaitu Teori Pendidikan Karakter, prinsip pendidikan karakter adalah berusaha mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, emosional, dan etis pada peserta didik serta untuk meningkatkan komitmen bersama agar peserta didik mampu menjadi orang yang bertanggungjawab, peduli dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi yang lain (Althof dan Berkowitz, 2006). Dalam hal ini, prinsip pendidikan karakter jelas menjadi landasan dasar bagi sistem zonasi yang menerapkan pemerataan pendidikan bagi para siswa dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan yang berbeda.

Kedua, Teori Pendidikan Multikultural, prinsip dasar pendidikan multikultural adalah mendorong agar mereka tidak hanya memahami mata pelajaran yang diajarkan padanya tapi juga mampu mempraktekkan pemahaman mereka tentang berbagai keragaman budaya seperti agama, ras, suku, klas sosial ekonomi hingga keragaman kemampuan dan lain-lain. Pemahaman tentang keragaman itu kemudian dijadikan alat untuk memudahkan mereka dalam memahami mata pelajaran yang mereka pelajari. Begitu pula sebaliknya (James J Banks, 1986). Konsep pendidikan ini sangat erat dengan apa yang ingin dicapai oleh sistem zonasi yaitu siswa dapat menjadi maju bersama meski latar belakang budaya dan kemampuan mereka berbeda.

Ketiga, Teori Pendidikan Moral, yaitu salah satu model pendidikan karakter yang cukup tua. Filosof klasik seperti Konfusius dan Aristoteles adalah penggerak pendidikan moral yang percaya bahwa dengan mengajarkan nilai-nilai moral, maka masa depan umat manusia akan menjadi lebih baik (Althof dan Berkowitz, 2006: 495). Dalam hal ini, Pendidikan Moral jelas menjadi dasar yang kuat bagi sistem zonasi yang berupaya meminimalkan eksklusifisme dan diskriminasi.

1.5.1.2 Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan salah satu peraturan terbaru yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Dalam sistem ini, sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 90 persen dari jumlah peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat. Sisanya, sebanyak lima persen disediakan bagi calon siswa yang mengambil jalur prestasi, serta lima persen lagi untuk anak pindahan atau yang terkena bencana alam atau sosial.

Peraturan mengenai sistem penerimaan peserta didik baru kemudian disempurnakan kedalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dalam pasal 12 dan 13 mengatur beberapa sistem penerimaan siswa baru dengan jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah, jalur afirmasi

sebanyak paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung sekolah, jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5% (lima persen) dan apabila terdapat sisa kuota maka akan dibuka jalur prestasi.

Domisili calon peserta didik baru harus sesuai dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), adapun calon siswa yang tidak memiliki Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh bencana alam maupun bencana sosial maka wajib melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pasal 18 ayat 3, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota yang sama dengan sekolah asal. Aturan ini di buat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk meratakan kualitas setiap sekolah agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang dianggap favorit atau tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi ini lebih mempermudah pengawasan orangtua terhadap anaknya dan mampu menekan biaya pendidikan khususnya untuk transportasi.

1.5.1.3 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Penggambaran keadaan bumi dalam keadaan datar merupakan salah satu kebutuhan awal bagi para pengelola dan perencana sumberdaya alam maupun keperluan militer. Namun penyajian kondisi muka bumi dengan cara manual tersebut akan mengalami beberapa hambatan, apabila akan dilakukan perbaikan informasi maupun penggabungan dengan sumber informasi lainnya. Adanya perkembangan pemanfaatan komputer dalam penanganan data geografis. Perkembangan ini terutama dimulai awal tahun 1980-an, dimana personal komputer mulai memasuki pasaran. Perkembangan perangkat keras yang didominasi PC ini ternyata diikuti oleh adanya perkembangan perangkat lunak aplikasi geografi. Salah satu bentuk aplikasi yang berkembang selaras dengan perkembangan tersebut adalah Sistem Informasi Geografi (SIG). SIG digunakan untuk mengolah data spasial yang memiliki referensi geografi. ESRI (1990)

mendefinisikan sistem informasi geografi sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.

SIG memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkan, menganalisis dan memetakan hasilnya. Data yang akan diolah dalam SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya.

SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis yaitu masukan, keluaran, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), serta analisis dan manipulasi data. Tujuan penggunaan SIG dalam penelitian yaitu dapat memberikan gambaran yang lengkap dan akurat terhadap suatu masalah nyata yang terkait dengan data spasial permukaan bumi sehingga mendapatkan hasil analisa yang detail dan akurat. Selain itu, SIG juga memiliki kemampuan yang baik dalam memvisualkan data spasial, sehingga mempermudah dalam modifikasi warna, bentuk, dan ukuran simbol yang diperlukan dalam penggambaran permukaan bumi. SIG juga dapat digunakan untuk interpretasi data secara manual (Prahasta, 2002)

Sumber data pada SIG diperoleh dengan cara data lapangan, data peta dan data penginderaan jauh. Data lapangan didapatkan secara langsung melalui pengamatan atau observasi di lapangan dengan cara mengukur dan menghitungnya. Data peta seperti koordinat atau letak geografis diperoleh dari informasi yang tercetak di peta, sedangkan data penginderaan jauh diperoleh dari citra satelit maupun foto udara.

Fasilitas perangkat lunak SIG digital pada dasarnya dapat dirinci menjadi tiga sub-sistem yang saling terkait, yaitu: sub-sistem pemasukan data, sub-sistem pemrosesan data dan sub-sistem output. Analisis spasial yang sering digunakan

dalam SIG yaitu *overlay*. *Overlay* yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. *Overlay* atau biasanya disebut sebagai tumpang susun merupakan proses yang digunakan untuk menggabungkan atau menyatukan informasi dari beberapa data spasial, baik data geografis atau geometri maupun data atributnya dan selanjutnya untuk menghasilkan informasi baru (Prahasta, 2002)

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Krisna Margianto Mawardhono (2006), dengan judul penelitian “*Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah (a) mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, (b) mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, (c) mengetahui asal murid pada masing-masing sekolah di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah survei dan didukung dengan interpretasi peta data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar adalah acak, faktor- faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan dasar yaitu aksesibilitas, kecenderungan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan cenderung memilih diluar daerahnya, dalam hal ini lebih mempertimbangkan yang dekat dengan pemukiman dan faktor kualitas sekolah.

Ina Noviana (2016), dengan judul penelitian “*Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali*”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah (a) menganalisis pola sebaran gedung Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali, (b) menganalisis faktor yang mempengaruhi sebaran gedung Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali, (c) menganalisis asal murid pada masing-masing Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah survei yang didukung dengan analisis data sekunder. Hasil penelitiannya adalah Peta pola sebaran fasilitas Sekolah

Menengah Atas di Kabupaten Boyolali, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran Sekolah Menengah Atas adalah aksesibilitas, kualitas sekolah, kecenderungan pemanfaatan fasilitas pendidikan oleh masyarakat, dan ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat, serta murid Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali berasal dari berbagai wilayah, khususnya di luar kecamatan sekolah tersebut berada.

Destyawati (2022) meneliti tentang analisis kesesuaian persebaran daerah asal siswa dengan zonasi sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi keruangan siswa sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Boyolali dan mengevaluasi serta mengkaji kesesuaian zonasi dengan daerah asal siswa sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan hasil yang diharapkan adalah Peta Asal Siswa SMA Negeri di Kabupaten Boyolali dan Peta Kesesuaian Persebaran Daerah Asal Siswa Dengan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali.

Adapun perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Perbandingan antar penelitian

Nama	Krisna Margianto Mawardhono	Ina Noviana	Destyawati
Tahun Penelitian	2006	2016	2019
Judul Penelitian	Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.	Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali.	Analisis Kesesuaian Persebaran Daerah Asal Siswa Dengan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali.
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan jumlah fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 2. Perbedaan asal murid bukan hanya murid berasal dari kelurahan itu sendiri tetapi ada yang berasal dari kelurahan lain di Kecamatan Colomadu atau memilih daerah lain di luar Kecamatan Colomadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola sebaran gedung Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 3. Dari mana asal murid baru pada masing-masing Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asal siswa pada setiap Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali dari berbagai wilayah baik area terdekat maupun luar kota dan provinsi. 2. Kesenjangan antar kualitas sekolah yang mengakibatkan para calon siswa lebih memilih SMA unggulan walaupun jarak rumah dan sekolah cukup jauh.
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 2. Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pola sebaran gedung Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi sebaran gedung Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 3. Menganalisis asal murid pada masing-masing Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali. 2. Mengevaluasi kesesuaian zonasi dengan daerah asal siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali.
Metode Penelitian	Metode yang digunakan adalah survei yang di dukung dengan interpretasi peta data sekunder	Metode yang digunakan adalah survei yang di dukung dengan analisis data sekunder	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta pola sebaran fasilitas pendidikan sedolah dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan dasar yaitu aksesibilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta pola sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan yaitu aksesibilitas, kualitas sekolah, kecenderungan pemanfaatan fasilitas pendidikan oleh masyarakat dan ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan. 3. Peta asal murid Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Asal Siswa SMA Negeri di Kabupaten Boyolali. 2. Peta Kesesuaian Persebaran Daerah Asal Siswa Dengan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupeten Boyolali. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sesuai tidaknya sebaran asal siswa dengan zonasi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali.
-------------------------	--	---	--

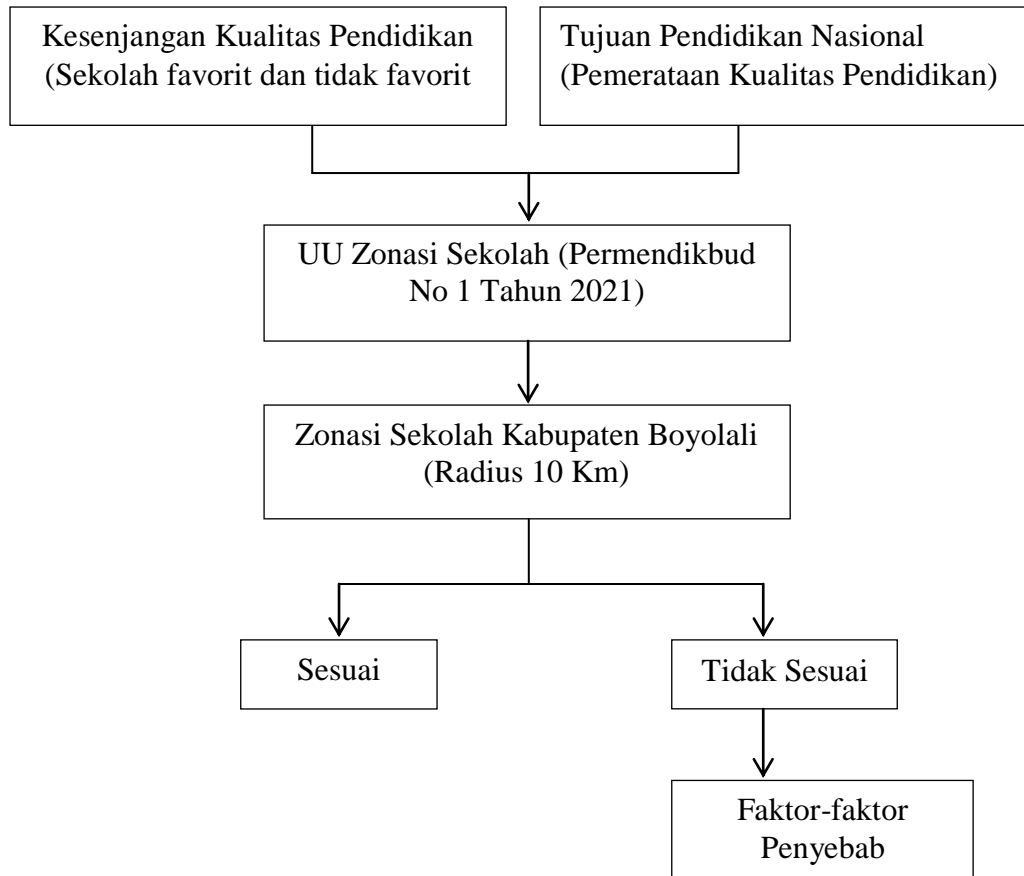
1.6 Kerangka Penelitian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tidak sedikit kesenjangan kualitas pendidikan khususnya di desa dan di kota, dapat dilihat dari kualitas fasilitas sekolah, kualitas tenaga pengajar di perkotaan yang cenderung bagus maka akan berbeda hasilnya dengan fasilitas, kualitas sekolah maupun kebijakan-kebijakan di wilayah desa yang cenderung tertinggal. Fenomena sekolah favorit dan tidak favorit juga membuat kesenjangan pendidikan semakin terlihat, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai proses penerimaan siswa baru yang tidak selalu dilihat dari nilai dan prestasi masing-masing calon siswa. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dimana penerimaan siswa baru berdasarkan jarak terdekat rumah siswa dengan sekolah yang akan dituju.

Secara detail penelitian dapat di lihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.7 Batasan Operasional

1. Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan (John Dewey, 2004)
2. Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (ESRI, 1990). Overlay merupakan proses tumpangtumpukan atau kemampuan untuk menempatkan satu grafis diatas grafis lain dan menampilkannya pada layar komputer (Prahasta, 2002).
3. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sistem tersebut mengatur paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah siswa yang akan diterima adalah dari sistem zonasi.